

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN FORWARD-LOOKING INFORMATION**

IRMA NOVIA<sup>1</sup>

NIKI LUKVIARMAN<sup>2</sup>

ERNA SETIANY<sup>3</sup> (erna.setiany@mercubuana.ac.id)

<sup>1,2</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Indonesia

<sup>3</sup> Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

**ABSTRACT**

*This study investigated the influence of corporate governance on the disclosure of forward-looking information. The study's secondary data was collected from the annual report of consumer goods industry manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange for 2017-2019 using the purposive sampling technique, and 122 annual reports were obtained as the research sample. Model analysis in this research is multiple linear regression analysis models. The results of this study showed that the board size and the frequency of audit committee meetings have a positive and significant effect on the disclosure of forward-looking information. The proportion of independent audit committees has a negative and significant effect on the disclosure of forward-looking information. The proportion of board independence, public ownership, and audit quality have no significant effect on the disclosure of forward-looking information.*

**Keywords:** corporate governance, disclosure, forward-looking information

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019, dengan teknik *purposive sampling* didapatkan 122 laporan tahunan sebagai sampel penelitian. Untuk pengujian hipotesis, peneliti menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*, proporsi komite audit independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* dan proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

**Kata kunci:** corporate governance, pengungkapan, forward-looking information.

**PENDAHULUAN**

Tiga tahun terakhir jumlah investor di industri pasar modal Indonesia terus meningkat, yang ditandai dengan peningkatan *Single Investor Identification* (SID). Pada tahun 2017 jumlah SID tercatat 1.122.668 SID, pada tahun 2018 tercatat 1.617.367 SID sehingga terjadi peningkatan jumlah SID sebesar 44% pada tahun 2018 dari tahun 2017 (Kompas.com, 2018). Pada tahun 2019 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor sebanyak 2.480.000 SID, jumlah ini mengalami pertumbuhan 53% dibandingkan tahun 2018 (Kompas, 2020).

Peningkatan investor ini dapat diartikan meningkatnya kebutuhan informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sehingga kebutuhan investor ini memerlukan *supply* informasi yang memadai dari perusahaan, salah satu yang relevan adalah *forward-looking information*. Namun demikian hasil studi PWC (2007) memperlihatkan bahwa keengganan perusahaan mengungkap lebih banyak *forward-looking information*. Studi ini mengungkap kekhawatiran perusahaan bahwa pengungkapan *forward-looking* akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi yang sensitif sehingga merugikan

perusahaan dalam memenangkan persaingan atau mengekspos diri mereka pada ancaman litigasi. Namun pengungkapan *forward-looking* melengkapi data historis perusahaan meningkatkan *decision usefulness* dari laporan keuangan (Buerthey & Pae, 2020).

Pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh regulator pasar belum mampu memuaskan kebutuhan investor sehingga perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela (Oktriani & Arza, 2018). Informasi tambahan sukarela dimaknai sebagai pengungkapan sukarela, dimana pengungkapan ini merupakan upaya perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pengungkapan sukarela diberikan oleh perusahaan diluar item-item yang diwajibkan untuk diungkapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan guna memberikan informasi yang lebih relevan serta meningkatkan kinerja perusahaan di bursa saham (Sunyoto & Hidayanti, 2009).

Pada penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengungkapan *forward-looking information* yang merupakan bagian dari pengungkapan sukarela. Pengungkapan *forward-looking information* merupakan kategori informasi mengenai prakiraan masa depan yang memungkinkan para pengguna laporan tahunan dapat menilai kinerja masa depan perusahaan, hal ini termasuk rencana manajemen, evaluasi peluang dan risiko, dan data perkiraan tentang operasional perusahaan (Menicucci, 2013).

Pengungkapan ini diperlukan karena laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi memuat informasi bersifat historis mengenai kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen (Utami, Wahyuni & Nugroho, 2020). Sedangkan keadaan ekonomi semakin dinamis sehingga informasi yang bersifat historis dianggap kurang relevan untuk memenuhi kebutuhan investor sejalan dengan perkembangan ekonomi (Muliawati dan Rohman, 2019). Karena informasi historis pada laporan tahunan dianggap tidak cukup bagi pihak eksternal dalam pemenuhan kebutuhan informasi

dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka perusahaan perlu menambahkan pengungkapan *forward-looking information* pada laporan tahunan (Mardani & Kristanto, 2020).

Berdasarkan penelitian Maghfira & Tresnaningsih (2018), rata-rata pengungkapan *forward-looking information* selama periode 2012-2013 pada perusahaan manufaktur di Indonesia hanya 32,6%. Pada penelitian Utami & Wahyuni (2018), tingkat rata-rata pengungkapan *forward-looking information* adalah 48,76% pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2016. Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat dikategorikan bahwa pengungkapan *forward-looking information* di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini mengingat berdasarkan kedua penelitian terdahulu di Indonesia terlihat bahwa tingkat pengungkapan sejak tahun 2012-2016 masih di bawah 50% dari tingkat pengungkapan optimal yang ideal.

Pengungkapan *forward-looking information* yang masih rendah, menurut Aljifri & Hussainey (2007) disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu yang pertama, karena ketidakpastian terkait masa depan sehingga menyebabkan kesulitan dalam memprediksi secara akurat. Kedua, prakiraan yang tidak akurat dapat menyebabkan risiko litigasi sehingga manajer mengurangi pengungkapan dalam memberikan pengungkapan informasi masa depan, dimana manajer percaya bahwa sistem hukum tidak membedakan antara kesalahan perkiraan yang bisa terjadi akibat ketidakpastian atau bias manajemen yang disengaja. Ketiga, pengungkapan *forward-looking information* mungkin memberikan informasi yang berguna kepada pesaing dan hal ini dapat memengaruhi posisi kompetitif perusahaan di pasar. Ketiga kondisi tersebut mencerminkan tekanan risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengungkap *forward-looking information*. Kılıç & Kuzey (2018) menyatakan bahwa dalam menyajikan informasi mengenai keuangan dan nonkeuangan perusahaan cenderung menyampaikan informasi secara kualitatif, bukan kuantitatif dengan adanya tekanan

risiko litigasi maka pada perusahaan yang dapat memberikan lebih banyak pengungkapan *forward-looking information* secara kuantitatif akan membuat pengguna laporan tahunan lebih yakin terhadap informasi yang disampaikan dan mempercepat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengungkapan *forward-looking information* berkualitas terkait dengan aspek lain yaitu *corporate governance* yang merupakan mekanisme pengawasan terhadap perilaku manajemen (Muliawati & Rohman, 2019). Menurut Lukviarman (2004) *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. *Corporate governance* menggambarkan bagaimana cara perusahaan diarahkan dan dikendalikan untuk kepentingan terbaik para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham (Agyei-Mensah, 2017).

*Corporate governance* mendapat perhatian lebih sejak runtuhnya Enron (Al-Najjar & Abed, 2014). Sistem *corporate governance* yang lemah dan kurangnya pengungkapan dari pihak perusahaan adalah beberapa alasan mengapa krisis keuangan pada tahun 1997-1998 berdampak parah pada perusahaan terutama di negara-negara Asia (Dzaraly, Lokman & Othman, 2018). Dari kejadian tersebut, hal ini meningkatkan tekanan pada perusahaan untuk membangun lingkungan *corporate governance* yang kuat untuk melindungi hak dari pemegang saham dari tindakan manajer yang berpeluang untuk mementingkan kepentingan pribadi mereka.

Jika perusahaan memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik, maka perusahaan dapat menyajikan pengungkapan *forward-looking information* yang berkualitas dan terhindar dari bias informasi sehingga dapat mengurangi asimetri informasi. Menurut Ajibola (2017), motif utama pengungkapan *forward-looking information* untuk menutupi celah asimetri informasi perusahaan dengan pemangku kepentingan, dengan adanya pengungkapan *forward-looking information* akan memberikan fakta tentang kinerja masa depan kepada pemangku

kepentingan untuk evaluasi mereka. *Corporate governance* memfasilitasi pembentukan strategi pengungkapan yang unggul, memungkinkan manajer untuk memberikan realistikitas bisnis kepada pemegang saham melalui pengungkapan yang lebih besar seperti *forward-looking information* sehingga menghindari asimetri informasi terkait dengan hubungan *principal-agent* (Buerterey & Pae, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information* masih sangat minim di Indonesia. Penelitian serupa ini lebih banyak dilakukan oleh negara maju. Salah satu referensi utama penelitian ini adalah penelitian Ajibola (2017), namun demikian sejumlah penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Beberapa perbedaan penelitian ini dengan Ajibola (2017) adalah mengganti pengukuran pengungkapan berdasarkan Kılıç & Kuzey (2018), yang lebih komprehensif karena menyertakan informasi kualitatif dalam indeksnya.

Perbedaan lain antara penelitian ini dan penelitian Ajibola (2017) adalah dalam *context* budaya dan sistem hukum antara Indonesia dan Nigeria. Perbedaan sistem hukum ini merupakan poin penting yang belum dibahas dalam penelitian Ajibola (2017) dalam penelitiannya. Perbedaan sistem hukum berkonsekuensi pada perbedaan model *corporate governance*. Penelitian Ajibola (2017) mengikuti model *anglo-saxon* dengan menggunakan sistem dewan tunggal (*one-tier board system*) dimana dalam model ini hanya terdapat *board of director* sebagai dewan tunggal. Sedangkan Indonesia mengikuti model *continental european* dengan menggunakan sistem dewan dua tingkat (*two-tier board system*) yaitu adanya dewan komisaris (*supervisory board*) yang terpisah dengan direksi (*management board*).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena pengungkapan *forward-looking information* yang tergolong dalam pengungkapan sukarela. Dalam merilis pernyataan *forward-looking information* tidak terdapat aturan baku berdasarkan aturan regulator tentang bagaimana

perilisannya sehingga perilsan tersebut sesuai dengan kebijaksanaan manajerial perusahaan. Menurut Buertey & Pae (2020), diberikannya pengungkapan diskresi kepada manajer dalam pengungkapan *forward-looking information* dapat mengarah kepada pengungkapan informasi positif, atau sebaliknya menjadi kurang transparan mengenai kondisi perusahaan dan menyebabkan bias informasi yang didapatkan pengguna laporan tahunan. Pengungkapan sukarela dapat dikaitkan dengan motivasi manajemen yang mendasari pengungkapan tersebut. Salah satunya disampaikan oleh Utami & Wahyuni (2018) yang menyatakan bahwa manajemen ingin memberikan informasi privat ketika informasi belum menjadi kewajiban (wajib), dan perusahaan yang memiliki kualitas laba yang lebih baik (penghasilan persisten) cenderung memberikan lebih banyak informasi berwawasan ke depan.

Dengan demikian penelitian ini merumuskan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Indonesia. Adapun *corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan menjadi ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan publik, dan kualitas audit.

Artikel ini terdiri dari beberapa poin utama, diawali dengan pendahuluan kemudian dilanjutkan bagian kedua menjabarkan teori untuk menghipotesiskan hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi *forward-looking information*; bagian ketiga menjabarkan metode penelitian; bagian keempat menjabarkan analisis data dan pembahasan; bagian kelima menyajikan simpulan, keterbatasan, dan saran.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), menyatakan

bahwa manajer merupakan agen yang ditugaskan/didelegasikan oleh prinsipal selaku pemilik perusahaan. Hal ini kemudian memicu adanya konflik kepentingan di antara kedua belah pihak. Kondisi ini dapat dilihat dari perusahaan besar yang tergabung dalam bursa efek. Pemegang saham perusahaan yang tergabung dalam bursa efek tidak dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer perusahaan secara langsung. Para investor mengandalkan informasi yang disajikan manajer dan pengawasan oleh dewan komisaris beserta atributnya. Dengan demikian muncul potensi asimetri informasi di antara investor dan manajer. Menurut Utami *et al.* (2020), informasi asimetri adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perolehan informasi antara manajemen sebagai penyedia informasi dan pemegang saham dan pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi. Scott & O'Brien (2019) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis informasi asimetri, yaitu: (i) seleksi yang merugikan, yaitu manajer dan orang dalam lainnya biasanya tahu lebih banyak tentang kondisinya dan prospek perusahaan daripada investor luar dan fakta yang dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham manajer untuk tidak mengungkapkan informasi kepada pemegang saham; (ii) *moral hazard*, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manajer tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham atau pemberi pinjaman.

### Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dibagi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Setiawan, 2017). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi-informasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan (Nugraheni, 2018). Untuk perilsan pengungkapan wajib diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 ten-

tang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut Choi & Meek (2008) pengungkapan *forward-looking information* ini merupakan pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Pengungkapan *forward-looking information* adalah kategori informasi mengenai prakiraan masa depan yang memungkinkan pengguna untuk menilai kinerja masa depan perusahaan, hal ini termasuk rencana manajemen, evaluasi peluang dan risiko, dan data perkiraan tentang operasional perusahaan (Menicucci, 2013).

Pengungkapan *forward-looking information* disajikan pada beberapa bagian laporan tahunan perusahaan yaitu pada bagian laporan direksi, laporan dewan komisaris, diskusi dan analisis manajemen (Maghfira & Tresnaningsih, 2018). Ada berbagai istilah atau kata kunci yang dicantumkan dalam laporan tahunan yang merepresentasikan *forward-looking information* beberapa istilah seperti mungkin, memprediksi, mengharapkan, meramalkan, memperkirakan dan berharap, periode yang akan datang (Alkhatib, 2014).

Menurut Choi & Meek (2008) istilah *forward-looking information* meliputi (1) perkiraan pendapatan, laba (rugi), arus kas, pengeluaran modal dan hal-hal keuangan lainnya; (2) tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi masa depan yang tidak menentu daripada perkiraan menyangkut proyek, periode fiskal dan proyeksi jumlah; dan (3) laporan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan. Secara umum kategori informasi dari *forward-looking information* yaitu (1) perkiraan, (2) informasi potensial, dan (3) sasaran dan tujuan.

*Forward-looking information* memberikan pemaparan tentang kinerja masa depan mereka kepada pemangku kepentingan (Ajibola, 2017). Menurut Dzaraly *et al.* (2018) investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela yang rendah sehingga perusahaan memilih mengungkapkan *forward-looking*

*information* untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan (*shareholder*).

### **Corporate Governance**

*Corporate governance* merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai perangkat atau kelembagaan serta aturan main (*code of conduct*) dan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan (*checks and balances*) agar sistem dapat bekerja secara optimal (Lukviarman, 2004). *Corporate governance* ada sejak entitas mulai dibentuk dan terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol entitas. Dengan adanya pemisahan ini, maka diperlukan mekanisme untuk menjamin bahwa manajemen (*agent*) yang merupakan orang gajian pemilik modal (*principal*) akan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik (Lukviarman, 2004).

Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) prinsip dasar *corporate governance* yang harus diterapkan perusahaan dalam setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Salah satu prinsip dasar *corporate governance* yaitu transparansi, bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis sehingga perusahaan harus menyediakan informasi material dan juga relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) (KNKG, 2006).

Penerapan *corporate governance* yang baik untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan tahunan, sehingga akan cenderung mengungkapkan pengungkapan *forward-looking information* (Al-Najjar & Abed, 2014). Menurut Sunyoto & Hidayanti (2009), bahwa pengungkapan mempunyai hubungan yang signifikan dalam mengurangi asimetri informasi.

Melalui pengungkapan yang lebih banyak seperti pengungkapan *forward-looking information*, perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* (Buertey & Pae, 2020).

Dalam pelaksanaannya sistem *corporate governance* dijalankan oleh sebuah mekanisme. Mekanisme *corporate governance* ialah mekanisme yang mengontrol dan mengawasi kegiatan perusahaan serta mengambil tindakan korektif ketika perusahaan keluar dari jalur seharusnya (Dzaraly *et al.*, 2018). Maka dalam penerapannya, dibutuhkan seperangkat aturan main yang jelas agar berbagai perangkat organisasi dalam sebuah sistem dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin terjaganya kepentingan berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan (Lukviarman, 2004).

Menurut teori agensi, perusahaan dengan biaya agensi yang tinggi akan berusaha mengurangi biaya agensi tersebut dengan meningkatkan pengungkapan sukarela dan menggunakan perangkat pemantauan intensif sebagai pengawas dengan kehadiran dewan komisaris independen (Agyei-Mensah, 2017). Berdasarkan teori ini, maka perusahaan akan meningkatkan pengungkapan *forward-looking information* agar dapat mengurangi asimetri informasi dan biaya agensi (Hassanein & Hussainey, 2015).

#### **Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan *Forward-Looking Information***

Ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan berasal dari internal atau eksternal perusahaan atau yang independen dalam suatu perusahaan (Fatmawati, Astuti & Suhardjanto, 2018). Berdasarkan hasil penelitian Agyei-Mensah (2017) menunjukkan pengaruh positif dimana fungsi dewan komisaris ialah melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen, maka dengan meningkatkan jumlah anggota dewan komisaris dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan manajemen. Pada penelitian Buertey & Pae (2020) hasil penelitian menunjukkan tidak

terdapat pengaruh signifikan dari ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *forward-looking* sehingga ukuran dewan komisaris yang besar tidak memengaruhi dalam pengungkapan *forward-looking information* yang tinggi.

Hasil penelitian Kılıç & Kuzey (2018), ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* karena ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan penurunan kualitas informasi kepada pemangku kepentingan akibat dari kurangnya komunikasi dan koordinasi. Hasil penelitian Ajibola (2017) juga menunjukkan terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan *forward-looking information*, menurutnya ukuran dewan komisaris yang besar dapat membatasi tingkat pengungkapan karena faktor argumen yang tidak dapat dipertahankan dalam aktualisasi. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

#### **Proporsi Komisaris Independen dan Pengungkapan *Forward-Looking Information***

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris perusahaan yang tidak dipekerjakan oleh perusahaan (Agyei-Mensah, 2017). Untuk mengurangi adanya risiko kolusi antara dewan komisaris dan manajemen, maka dewan komisaris diduduki oleh sejumlah anggota yang disebut komisaris independen, yaitu profesional yang bukan dari manajemen dan tidak memiliki hubungan bisnis atau kepemilikan dengan perusahaan.

Komisaris independen berfungsi untuk meningkatkan mekanisme *corporate governance*, untuk mencegah kerugian yang berdampak kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan keberadaan komisaris independen dapat mengurangi biaya agensi (Uyar & Kılıç, 2012). Berdasarkan penelitian Buertey & Pae (2020) komisaris independen dapat

mengurangi ketidakseimbangan informasi sehingga dapat mengurangi asimetri informasi dan membawa peningkatan dalam pengungkapan *forward-looking information*.

Pada penelitian Ajibola (2017) proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh positif yang menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas pemantauan sehingga akan mengarahkan kepada pengungkapan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian Al-Najjar & Abed (2014), proporsi komisaris independen tidak signifikan memengaruhi pengungkapan *forward-looking information* hal ini diakibatkan lemahnya peran komisaris independen di negara Inggris. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

#### **Kepemilikan Publik dan Pengungkapan *Forward-Looking Information***

Jumlah saham publik menunjukkan besarnya *private information* yang harus disampaikan manajer kepada publik, sehingga semakin besar proporsi kepemilikan publik akan berakibat pada peningkatan pengungkapan informasi yang lebih banyak (Agustin & Oktavianna, 2019). Dalam penelitian Ajibola (2017), kepemilikan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* karena pada objek penelitian mayoritas dari kepemilikan saham dimiliki oleh internal perusahaan.

Penelitian Uyar dan Kilic (2012) menunjukkan hasil penelitian kepemilikan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Hasil penelitian yang sama pada Mujiono & Nany (2010) dimana saham publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan dikarenakan objek penelitian yang dilakukan kepemilikan publik umumnya merupakan investor kecil sehingga tidak memiliki otoritas terhadap informasi keuangan dan nonkeuangan yang

diinginkan. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H3: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

#### **Proporsi Komite Audit Independen dan Pengungkapan *Forward-Looking Information***

Teori agensi memprediksikan keberadaan komite audit dapat mengurangi biaya agensi dengan membantu dewan komisaris melalui dalam pemantauan aktivitas manajemen dan kualitas audit. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Al-Najjar & Abed (2014) dimana proporsi komite audit independen berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Dalam penelitian Ajibola (2017) proporsi komite audit independen memiliki pengaruh positif dengan tingkat signifikan yang rendah, mengartikan perusahaan yang memiliki komite audit independen akan lebih cenderung mengungkapkan *forward-looking information*. Semakin meningkatnya pelaksanaan *corporate governance* akan meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya *corporate governance*. Hal ini menyebabkan proporsi komite audit independen mendekati homogen dan mengakibatkan tidak adanya perubahan yang berarti dalam proporsi ini sehingga hasil penelitian Mujiono & Nany (2010) menunjukkan pengaruh negatif. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H4: Proporsi komite audit independen berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

#### **Frekuensi Rapat Komite Audit dan Pengungkapan *Forward-Looking Information***

Frekuensi rapat komite audit merupakan metode dalam menyampaikan hasil pemantauan dari aktivitas pemantauan intensif dan semakin tinggi aktivitas frekuensi rapat komite audit akan membantu meningkatkan transparansi dalam laporan tahunan sehingga hasil

penelitian Ajibola (2017) menunjukkan pengaruh positif terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Frekuensi rapat komite audit merupakan indikator efektivitas kerja komite audit sehingga semakin sering pengadaan rapat komite audit akan mendorong intensitas komunikasi antar anggota komite audit dalam mendiskusikan isu-isu penting dan memecahkan masalah terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suyono & Eko (2018) menunjukkan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan perusahaan. Tetapi pada penelitian Rafifah & Ratmono (2015) jumlah rapat komite audit tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengungkapan sukarela, dikarenakan kurang efektifnya rapat komite audit dalam pelaksanaannya. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H5: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

**Kualitas Audit dan Pengungkapan *Forward-Looking Information***

Auditor eksternal dipercaya dapat berperan secara independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum (Sari, Anugerah & Dwiningsih, 2010). Pada

penelitian Uyar & Kilic (2012) ukuran auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung menyajikan lebih banyak pengungkapan selain KAP *Big Four*. Hasil yang serupa juga pada penelitian Buertey & Pae (2020) kualitas audit dari perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Berdasarkan penelitian Ajibola (2017) kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan, karena ukuran KAP *Big Four* memiliki kredibilitas kualitas pelaporan informasi lebih dalam. KAP *Big Four* juga memiliki pengalaman yang unggul, mendapatkan pengakuan secara internasional dan menjaga reputasi baik mereka. Sehingga dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dapat memberikan jaminan kepada investor bahwa pengungkapan *forward-looking information* memiliki informasi yang dapat dipercaya. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Rafifah dan Ratmono (2015) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dikarenakan KAP Indonesia berfokus dalam mengaudit laporan keuangan bukan laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

**Tabel 1.**  
Ringkasan Sampel

No	Kriteria	Tahun			Total
		2017	2018	2019	
1.	Jumlah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019	47	51	54	152
2.	Perusahaan yang tidak ditemukan data laporan tahunan selama 2017-2019	(2)	(3)	(3)	(8)
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan satuan mata uang Rupiah.	0	0	0	0
4.	Perusahaan yang tidak memiliki periode laporan tahunan yang berakhir per 31 Desember	0	0	0	0
5.	Perusahaan yang tidak menyajikan data secara lengkap	(4)	(6)	(6)	(16)
6.	Sampel Outlier	(2)	(2)	(2)	(6)
Total Sampel Penelitian/Observasi		39	40	43	122



H6 : *Kualitas* audit berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui alat analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dalam periode waktu 2017-2019 yang ada pada situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan data periode 2017-2019 karena pada periode tersebut kondisi pasar modal relatif normal sebelum pandemi Covid-19. Pembatasan periode ini mengingat pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia sejak Maret 2020. PricewaterhouseCooper (PWC, 2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya mendisrupsi kondisi keuangan perusahaan, namun juga mengubah secara signifikan pengungkapan perusahaan terutama yang berkaitan dengan masa depan perusahaan. Dalam kondisi normal, kebijakan pengungkapan perusahaan tampaknya tetap relatif sama dari waktu ke waktu (Botosan, 1997). Dengan demikian, karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dalam kondisi yang dapat digeneralisasi, maka penelitian dilakukan pada periode tahun 2017-2019.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan jenis teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu untuk dijadikan sampel. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel 122 observasi.

#### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

##### **Pengungkapan *Forward-Looking Information***

Indeks pengungkapan *forward-looking information* (FLID) berdasarkan penelitian Kılıç & Kuzey (2018), dengan menggunakan pendekatan analisis untuk menyelidiki total kualitatif dan kuantitatif dari pengungkapan *forward-looking information*

sebuah perusahaan. Dalam penelitian tersebut terdapat 30 item (bersifat kualitatif dan kuantitatif).

Pertimbangan yang mendasari penggunaan indeks Kılıç & Kuzey (2018) didasarkan apada dua hal. Pertama, adalah bahwa objek penelitian yang digunakannya adalah perusahaan manufaktur sehingga sampel penelitian tersebut sama dengan penelitian ini. Kesamaan alat ukur untuk meneliti pengungkapan dalam sektor yang sama merupakan poin penting yang ditekankan oleh Botosan (1997) bahwa industri yang berbeda menampilkan pola pengungkapan yang berbeda pula.

Alasan kedua adalah indeks Kılıç & Kuzey (2018) lebih komprehensif karena memberikan perhatian dan diferensiasi pada item pengungkapan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Adanya pembagian secara kualitatif dan kuantitatif dalam indeks pengungkapan memiliki kelebihan karena lebih memungkinkan bagi perusahaan untuk melaporkan pengungkapan *forward-looking information* dalam istilah kualitatif daripada penyampaian secara kuantitatif, dimana hal ini terjadi karena mengingat adanya risiko litigasi.

Berdasarkan daftar item tersebut, keberadaan setiap item akan diukur dengan menetapkan nilai 1 dan untuk ketiadaan item tersebut diungkapkan ditetapkan nilai 0, dan kemudian menjumlahkan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum pengungkapan.

##### **Ukuran Dewan Komisaris**

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6, dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Serta dewan komisaris memastikan bahwa perusahaan telah melakukan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan perusahaan (KNKG, 2006). Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan (Qu, Ee,

Liu, Wise & Carey, 2015).

### **Proporsi Komisaris Independen**

Keberadaan komisaris independen ini bertindak sebagai mekanisme kontrol saat mereka melakukan fungsi pengawasan secara independen (Agyei-Mensah, 2017). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris independen yang berasal dari luar emiten atau tidak mempunyai afiliasi dengan perusahaan dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris emiten. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20, paling sedikit satu orang komisaris independen jika dewan komisaris terdiri dari dua orang, dan paling kurang 30% jika dewan komisaris lebih dari dua orang anggota. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan salah satu komisaris independen mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (KNKG, 2006).

### **Kepemilikan Publik**

Saham publik menunjukkan tingkat kepemilikan dari berapa jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat publik. Pengertian publik di sini adalah pihak individu diluar manajemen perusahaan dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan sehingga dalam penelitian ini variabel kepemilikan publik diukur dengan proporsi jumlah lembar saham yang dimiliki publik dibandingkan dengan jumlah lembar saham beredar. Besarnya jumlah saham ditawarkan kepada publik menunjukkan besarnya *private information* yang harus dibagikan oleh manajer kepada masyarakat. *Private information* adalah informasi yang hanya diketahui oleh manajer, diantaranya pengukuran kinerja perusahaan, perencanaan bonus, dan lainnya (Agustin & Oktavianna, 2019). Maka cara perusahaan membagikan informasi tersebut dengan mengungkapkan dalam laporan tahunan.

### **Proporsi Komite Audit Independen**

Komite audit independen merupakan anggota yang berasal dari luar perusahaan atau anggota dewan komisaris yang tidak melakukan tugas-tugas eksekutif dan terdiri paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen (Mujiono dan Nany, 2010). Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan dan salah seorang anggota memiliki latar belakang kemampuan akuntansi atau keuangan (KNKG, 2006). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Adapun komposisi komite audit dalam perusahaan paling sedikit tiga anggota dengan mayoritas harus independen. Oleh sebab itu pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan jumlah komite audit yang berasal dari independen dengan jumlah total anggota komite audit.

### **Frekuensi Rapat Komite Audit**

Penyelenggaraan rapat komite audit dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit mengadakan rapat satu kali dalam tiga bulan dan rapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota komite audit. Pertemuan atau rapat komite audit berfungsi sebagai media untuk melaksanakan berbagai perbaikan atau evaluasi yang dibutuhkan termasuk untuk memastikan kualitas dari laporan keuangan (Zulfikar, Nofianti & Faozy, 2019). Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, antar anggota komite audit akan melakukan koordinasi dan membahas temuan-temuan dari pengawasan dan analisis terkait laporan keuangan perusahaan (Mutmainnah & Wardhani, 2013). Penelitian ini mengukur variabel rapat komite audit dengan jumlah rapat komite audit dalam satu tahun.

### **Kualitas Audit**

Kualitas audit akan memberikan keyakinan pada pengguna laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit dibedakan antara KAP besar dan KAP kecil, karena terdapat perbedaan dari segi sumber daya dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing KAP (Pratiwi & Palupi, 2017). Sehingga KAP besar diyakini dapat lebih memperhatikan pengungkapan yang dilakukan oleh kliennya (Agyei-Mensah, 2017).

Secara umum KAP dibedakan menjadi dua ukuran, yang pertama KAP berukuran besar dengan ruang lingkup global (*Big Four*) dan KAP berukuran kecil dengan ruang lingkup domestik (*non Big Four*), KAP *Big Four* dipercaya lebih berkualitas dari pada KAP *non Big Four* sebab auditor dengan kemampuan dan kualitas yang tinggi akan menjaga reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula (Sandy & Lukviarman, 2015). Variabel ini merupakan variabel *dummy*, dimana kualitas audit dibagi menjadi dua kategori, kategori perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* yang terdiri atas KAP Deloitte Touche Tohmatsu, PWC (PricewaterhouseCoopers), Ernst & Young, dan KPMG (Klynveld Peat Main Goerdeler) diberi nilai 1, kategori perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big Four* akan diberi nilai 0.

### **Ukuran Perusahaan**

Penelitian ini menggunakan logaritma natural total aset sebagai variabel kontrol untuk ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan upaya penilaian skala besar atau kecilnya sebuah perusahaan (Hutagalung, Tanjung & Basri, 2018). Umumnya penelitian di Indonesia ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu menggunakan total aset, *net sales*, dan *market capitalization* (Fatmawati *et al.*, 2018). Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah nilai aset perusahaan (Pratiwi dan Palupi, 2017).

Perusahaan yang berukuran besar membutuhkan kebutuhan pendanaan eksternal yang lebih besar sehingga berdasarkan teori agensi konsekuensinya

mereka harus mengungkapkan volume informasi sukarela yang lebih tinggi untuk mendapatkan akses pendanaan eksternal yang lebih bersaing (Siagian & Ghozhali, 2012). Perusahaan yang berukuran besar lebih disorot dalam pasar modal sehingga memberi tekanan untuk mengungkapkan informasi lebih lengkap dan banyak sebagai upaya mengurangi biaya keagenan (Purbandani & Restuti, 2012). Oleh karena itu, ukuran perusahaan masuk ke dalam regresi untuk mengontrol pengaruhnya terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

### **Leverage**

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dalam membiayai asetnya (Muliawati & Rohman, 2019). Dalam penelitian ini ukuran yang digunakan untuk mengukur variabel kontrol *leverage* adalah total kewajiban dibagi dengan total aset perusahaan (Alkhatib, 2014). *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang atau kewajiban-kewajibannya (Pratiwi & Palupi, 2017).

Faktor *leverage* ini sangat penting terhadap struktur modal perusahaan (Purbandani & Restuti, 2012). Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih tinggi dalam struktur modal akan membuat biaya keagenan yang lebih tinggi (Mujiono & Nany, 2010). Sebagai respon perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dengan mengungkapkan lebih banyak *forward-looking information* dalam laporan tahunan mereka untuk menyampaikan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan kreditor (Aljifri *et al.*, 2013). Oleh karena itu, *leverage* dimasukkan kedalam regresi untuk mengontrol pengaruhnya terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

### **Profitabilitas (ROE)**

Variabel kontrol ketiga dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, dan bertujuan untuk memperlihatkan keuntungan perusahaan pada suatu

periode tertentu (Pratiwi dan Palupi, 2017). Penelitian ini memproyeksikan profitabilitas dengan *return on equity* (ROE) yang diukur dengan proporsi laba sebelum pajak terhadap ekuitas. ROE digunakan untuk mengukur efektivitas kemampuan manajer dalam mengelola modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham (Purbandani & Restuti, 2012).

Berdasarkan teori pensinyalan, perusahaan akan lebih cenderung menunjukkan kualitas mereka kepada investor ketika profitabilitabilitas mereka tinggi, sehingga manajemen perusahaan akan lebih mengungkapkan informasi kepada publik untuk memberi kesan positif (Agyei-Mensah, 2017). Oleh karena itu, profitabilitas masuk ke dalam regresi untuk mengontrol pengaruhnya terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Tabel 2 menunjukkan hasil dari uji analisis statistik deskriptif perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 dengan jumlah sampel sebanyak 122 perusahaan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dari total komisaris termasuk di dalamnya adalah komisaris independen. Ukuran dewan komisaris merupakan variabel independen yang diukur dengan

cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris dari perusahaan tersebut. Rentang ukuran dewan komisaris antara nilai minimum dari maksimum cukup jauh, nilai minimum 2 orang dan nilai maksimum 8 orang. Nilai rata-rata (*mean*) ukuran dewan komisaris sebesar 3,9098 dan standar deviasi sebesar 1,4882.

Proporsi komisaris independen merupakan variabel independen yang diukur dengan rasio perbandingan komisaris independen dengan banyaknya dewan komisaris perusahaan. Proporsi komisaris independen dapat dikatakan cukup baik, mengingat nilai rata-rata (*mean*) proporsi dewan komisaris independen sebesar 42% mendekati 50% dan standar deviasi sebesar 12,8%. Adapun nilai minimum dari proporsi komisaris independen 66 sebesar 25% dan nilai maksimum 100%.

Kepemilikan publik merupakan variabel independen yang menggambarkan persentase saham publik yang dimiliki publik. Nilai minimum dari kepemilikan publik sebesar 3,5% dan nilai maksimum 83,7%. Rentang angka minimum dan maksimum tersebut sangat jauh yang memperlihatkan besarnya variasi variabel kepemilikan publik. Adapun nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan publik cukup rendah sebesar 23,7% dan standar deviasi sebesar 15,8%.

Proporsi komite audit independen merupakan variabel independen yang diukur dengan rasio perbandingan jumlah

**Tabel 2.**  
Statistik Deskriptif

	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Ukuran Dewan Komisaris	122	2,000	8,000	3,909	1,488
Proporsi Komisaris Independen	122	0,250	1,000	0,420	0,128
Kepemilikan Publik	122	0,035	0,837	0,237	0,158
Proporsi Komite Audit Independen	122	0,750	1,000	0,993	0,038
Frekuensi Rapat Komite Audit	122	1,000	20,000	6,057	3,469
Kualitas Audit	122	0,000	1,000	0,377	0,486
Ukuran Perusahaan	122	24,490	32,200	28,408	1,713
<i>Leverage</i>	122	0,030	0,770	0,385	0,179
Profitabilitas	122	-0,290	1,400	0,146	0,271
<i>Forward looking information Disclosure</i>	122	0,100	0,670	0,430	0,101
Valid N (listwise)	122				

komite audit independen dengan jumlah komite audit perusahaan. Nilai minimum dari proporsi komite audit independen sangat tinggi sebesar 75% dan nilai maksimum 100%, ini memperlihatkan tingkat variasi data yang cukup kecil. Adapun nilai rata-rata (*mean*) proporsi komite audit 99,3% dan standar deviasi sebesar 3,8%.

Frekuensi rapat komite audit merupakan variabel independen yang menggambarkan jumlah rapat komite audit. Variasi data variabel frekuensi rapat komite audit cukup tinggi, hal ini terlihat dari cukup jauhnya rentang antara nilai minimum dari frekuensi rapat komite audit adalah 1 kali dan nilai maksimum adalah 20 kali rapat. Nilai rata-rata (*mean*)

**Tabel 3.**  
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen

No	Pengungkapan	Tingkat Pengungkapan
1	Iklan dan perencanaan publikasi (Kualitatif)	90,98%
2	Iklan dan perencanaan publikasi (Kuantitatif)	5,74%
3	Rencana pengeluaran modal (Kualitatif)	74,59%
4	Rencana pengeluaran modal (Kuantitatif)	14,75%
5	Arus kas yang diharapkan (Kualitatif)	49,18%
6	Arus kas yang diharapkan (Kuantitatif)	2,46%
7	Target laba (Kualitatif)	37,70%
8	Target laba (Kuantitatif)	28,69%
9	Risiko keuangan (Kualitatif)	98,36%
10	Risiko keuangan (Kuantitatif)	1,64%
11	Peluang pertumbuhan (Kualitatif)	98,36%
12	Peluang pertumbuhan (Kuantitatif)	21,31%
13	Risiko industri dan pasar (Kualitatif)	98,36%
14	Risiko industri dan pasar (Kuantitatif)	1,64%
15	Proyek investasi (Kualitatif)	70,49%
16	Proyek investasi (Kuantitatif)	9,02%
17	Pangsa pasar yang diharapkan (Kualitatif)	99,18%
18	Pangsa pasar yang diharapkan (Kuantitatif)	18,03%
19	Risiko politik (Kualitatif)	91,80%
20	Risiko politik (Kuantitatif)	6,56%
21	Penelitian dan pengembangan produk yang direncanakan (Kualitatif)	95,08%
22	Penelitian dan pengembangan produk yang direncanakan (Kuantitatif)	14,75%
23	Profitabilitas yang diharapkan (Kualitatif)	35,25%
24	Profitabilitas yang diharapkan (Kuantitatif)	13,11%
25	Target penjualan (Kualitatif)	72,13%
26	Target penjualan (Kuantitatif)	47,54%
27	Harga saham (Kualitatif)	7,38%
28	Harga saham (Kuantitatif)	1,64%
29	Risiko lingkungan (Kualitatif)	85,25%
30	Risiko lingkungan (Kuantitatif)	0%

frekuensi rapat komite audit sebesar 6,057 dan standar deviasi sebesar 3,469.

Kualitas audit merupakan variabel independen dengan rata-rata (*mean*) 0,377 dengan standar deviasi sebesar 0,486. Variabel ini merupakan variabel dummy, pada sampel yang diaudit oleh KAP *Big Four* diberi nilai 1 dan non *Big Four* diberi nilai 0, dimana dari 122 sampel yang diamati terdapat 46 sampel yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan 76 sampel diaudit oleh KAP non *Big Four*.

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol pertama dalam penelitian ini yang diukur dengan proksi total aset perusahaan dengan menggunakan logaritma natural. Nilai minimum dari ukuran perusahaan sebesar 24,49 dan nilai maksimum 32,2. Nilai rata-rata (*mean*)

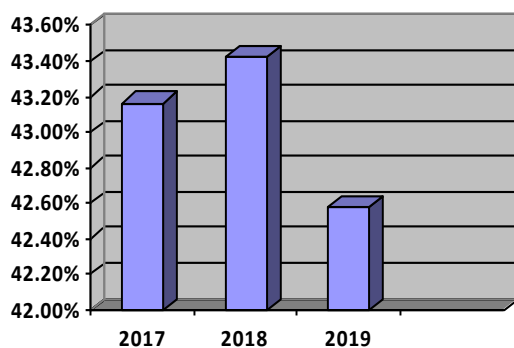
ukuran perusahaan sebesar 28,408 dan standar deviasi sebesar 1,713. *Leverage* merupakan variabel kontrol yang diukur dengan rasio total utang dibagi dengan total aset perusahaan. Nilai minimum dari *leverage* sebesar 0,03 dan nilai maksimum 0,77. Nilai rata-rata (*mean*) *leverage* sebesar 0,385 dan standar deviasi sebesar 0,179. Profitabilitas merupakan variabel kontrol yang menggunakan pengukuran rasio ROE dengan membandingkan laba bersih dengan total ekuitas. Nilai rata-rata (*mean*) profitabilitas sebesar 0,146 dan standar deviasi sebesar 0,271.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata persentase perusahaan dalam melakukan pengungkapan *forward-looking information* pada sampel penelitian ini adalah 43%, dimana persentase terendah sebesar 10% dan tertinggi sebesar 67%. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan *forward-looking information* masih tergolong rendah pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019.

Pengungkapan *forward looking information* sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum 0,1 atau 10% dan nilai maksimum 0,67 atau 67%. Pengungkapan *forward looking information* diukur dengan indeks pengungkapan *forward looking information*. Nilai rata-rata

**Gambar 1.**

Tren pengungkapan *forward-looking*



**Tabel 5.**

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	0,735	0,246	
Ukuran Dewan Komisaris	0,018	0,008	0,034 **
Proporsi Komisaris Independen	-0,070	0,075	0,354
Kepemilikan Publik	-0,001	0,001	0,242
Proporsi Komite Audit Independen	-0,687	0,231	0,004 ***
Frekuensi Rapat Komite Audit	0,008	0,002	0,003 ***
Kualitas Audit	-0,010	0,025	0,692
Ukuran Perusahaan	0,011	0,007	0,114
<i>Leverage</i>	0,012	0,051	0,821
Profitabilitas	0,027	0,037	0,470
<i>R square</i>	0,265		
<i>Adj. R Square</i>	0,206		
F	4,498		0,000
N	122		

(*mean*) pengungkapan *forward looking information* sebesar 43,07% dan standar deviasi dari pengungkapan *forward looking information* 10,196%.

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari tingkat pengungkapan *forward-looking information* per item pengungkapan pada 122 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Tingkat pengungkapan *forward-looking information* tertinggi yaitu pada item pengungkapan pangsa pasar yang diharapkan dengan penyampaian secara kualitatif sebesar 99,18%. Tingkat pengungkapan tertinggi lainnya dengan tingkat pengungkapan sebesar 98,36% yaitu pada item pengungkapan peluang pertumbuhan, risiko keuangan, dan risiko industri dan pasar yang mana penyampaian pengungkapan secara kualitatif.

Berdasarkan keseluruhan item pengungkapan terdapat item pengungkapan yang tidak diungkapkan oleh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 yaitu item pengungkapan risiko lingkungan yang penyampaian pengungkapan dalam bentuk kuantitatif. Untuk penyampaian pengungkapan *forward-looking information* terendah sebesar 1,64% yaitu pada item pengungkapan risiko keuangan, risiko industri dan pasar, dan harga saham yang mana penyampaian pengungkapan dalam bentuk kuantitatif. Item pengungkapan terendah lainnya yaitu item pengungkapan secara kuantitatif arus kas yang diharapkan sebesar 2,64%.

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bagaimana tren dari pengungkapan *forward-looking information* dalam periode tahun 2017-2019 pada 122 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Pada tahun 2017 dengan 39 sampel perusahaan tingkat pengungkapan *forward-looking information* pada tahun ini sebesar 43,16% , lalu terjadi peningkatan 0,26% pada tahun 2018 dengan 40 sampel tingkat pengungkapan pada tahun ini sebesar 43,42%, dan terjadi penurunan 0,86% pada tahun 2019 dengan

43 sampel perusahaan pada tahun ini tingkat pengungkapan sebesar 42,56%.

Tabel 4 menunjukkan tingkat penyampaian pengungkapan *forward-looking information* secara kuantitatif dan kualitatif pada 122 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan penyampaian pengungkapan secara kualitatif lebih tinggi sebesar 73,61% dibandingkan penyampaian pengungkapan secara kuantitatif sebesar 12,46%. Hal ini menandakan perusahaan dalam penyampaian pengungkapan *forward-looking information* lebih menyukai menyampaikan informasi secara kualitatif, yang mana hal ini sejalan dengan adanya risiko litigasi.

### Regresi Linear Berganda

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, penelitian ini terlebih dahulu melalui uji normalitas dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji normalitas data penelitian ini telah terdistribusi normal, terlihat dari uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), dimana asymp sig. berada di atas 0,05 yakni 0,200. Uji multikolinearitas data penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF menunjukkan tidak lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas juga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi dan nilai Durbin Watson pada penelitian ini sebesar 2,020 memperlihatkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

Tabel 5 memperlihatkan koefisien untuk persamaan regresi dari penelitian ini. Maka model regresi linear berganda yang diperoleh ialah:

$$FLID = 0,735 + 0,018UDK - 0,070PKI - 0,001KP - 0,687PKAI + 0,008FRKA - 0,010KA + 0,011FS + 0,012LEV + 0,027PRFT + \epsilon$$

Keterangan:  $\alpha$ : Konstanta; UDK: Ukuran

Dewan Komisaris; PKI: Proporsi Komisaris Independen; KP: Kepemilikan Publik; PKAI: Proporsi Komite Audit Independen; FRKA: Frekuensi Rapat Komite Audit; KA: Kualitas Audit; FS: Ukuran Perusahaan; LEV: *Leverage*; PRFT: Profitabilitas;  $\epsilon$ : error

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama (H1) variabel ukuran dewan komisaris (UDK) memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $2,143 > 1,981$  dan tingkat signifikansi  $0,034 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan secara parsial ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* sehingga hipotesis (H1) diterima. Dengan kata lain, berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris maka akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pengungkapan *forward-looking information*. Temuan dari hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Agyei-Mensah (2017) tetapi tidak sejalan dengan penelitian Ajibola (2017), Buerthey & Pae (2020), dan Kilic & Kuzey (2018). Dari temuan ukuran dewan komisaris yang memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *forward-looking information*, menjelaskan semakin besar ukuran dewan komisaris yang mana memiliki fungsi mengawasi (*supervisory*) dan menasehati (*advisory*) dapat meningkatkan efektivitas jalannya *corporate governance* sehingga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait pengungkapan yang dalam hal ini ditujukan pada pengungkapan *forward-looking information*.

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua (H2) variabel proporsi komisaris independen (PKI) memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $-0,930 > -1,981$  sehingga  $t$  hitung berada pada bagian daerah tolak dan tingkat signifikansi  $0,354 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan proporsi komite audit independen (PKAI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* sehingga hipotesis (H2) ditolak. Hal ini diduga karena independensi dewan komisaris dalam efektivitas pelaksanaan

tugasnya bergantung pada sistem dan budaya bisnis perusahaan, dengan kemungkinan dewan komisaris independen belum memiliki peran yang kuat sehingga kebanyakan keputusan berasal dari internal perusahaan. Hal lainnya yang menyebabkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dalam pengungkapan *forward-looking information* kemungkinan disebabkan karena keberadaan proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan hanya sebatas untuk memenuhi syarat dari regulasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Al-Najjar & Abed (2014) tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Rafifah & Ratmono (2015) dengan hasil penelitian proporsi komite audit independen berpengaruh negatif. Sedangkan pada penelitian Ajibola (2017) dan Buerthey & Pae (2020) menunjukkan hasil penelitian yang berpengaruh positif antara proporsi komisaris independen dan pengungkapan *forward-looking information*.

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga (H3) variabel kepemilikan publik (KP) memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $-1,176 > -1,981$  sehingga  $t$  hitung berada pada bagian daerah tolak dan tingkat signifikansi  $0,242 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan kepemilikan publik (KP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* sehingga hipotesis (H3) ditolak. Hal ini diduga karena besar kepemilikan publik pada perusahaan yang ada pada data penelitian terlalu memiliki variasi data dan juga sebagian besar perusahaan memiliki persentase kepemilikan publik yang rendah sehingga hal ini berkemungkinan membuat perusahaan tidak ingin untuk memberikan banyak *private information* kepada publik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ajibola (2017), Uyar & Kilic (2012), dan Mujiono & Nany (2010) yang menunjukkan hasil penelitian berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *forward-looking information*, dan juga penelitian Agustin & Oktavianna (2019) yang menunjukkan pengaruh positif antara kepemilikan publik dan pengungkapan sukarela.

Berdasarkan pengujian hipotesis



keempat (H4) variabel proporsi komite audit independen (PKAI) memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $-2,990 < -1,981$  dan tingkat signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan proporsi komite audit independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Sehingga hipotesis (H4) diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mujiono & Nany (2010) yang menunjukkan pengaruh negatif antara proporsi komite audit independen dengan pengungkapan *forward-looking information*. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepatuhan terhadap penyelenggaraan *corporate governance* sehingga menyebabkan proporsi komite audit independen semakin mendekati homogen dan mengakibatkan tidak adanya perubahan yang berarti dalam proporsi komite audit independen. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ajibola (2017) dan Al-Najjar & Abed (2014).

Berdasarkan pengujian hipotesis kelima (H5) variabel frekuensi rapat komite audit memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $3,049 > 1,981$  dan tingkat signifikansi  $0,003 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan frekuensi rapat komite audit (FRKA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Sehingga hipotesis (H5) diterima. Dengan kata lain berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya frekuensi rapat komite audit maka akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pengungkapan *forward-looking information*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ajibola (2017) dan Suyono (2018), sedangkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rafifah dan Ratmono (2015) bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Berdasarkan hasil temuan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *forward-looking information*, menjelaskan semakin banyak frekuensi rapat komite audit dapat menjadi media dalam efektivitas tugas komite audit terutama sebagai wadah

untuk melakukan transparansi laporan tahunan. Semakin banyak frekuensi rapat komite audit akan meningkatkan pengawasan dan evaluasi dari kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan yang akan berdampak pada peningkatan pengungkapan *forward-looking information*.

Berdasarkan pengujian hipotesis keenam (H6) variabel kualitas audit (KA) memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $-0,398 < -1,981$  sehingga  $t$  hitung berada pada bagian daerah tolak dan tingkat signifikansi  $0,692 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* sehingga hipotesis (H6) ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Rafifah & Ratmono (2015). Hal ini diduga karena KAP hanya melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan bukan laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Uyar & Kilic (2012), Buertey & Pae (2020) dan Ajibola (2017) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Ukuran perusahaan (FS) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Berdasarkan hasil uji statistik  $t$  pada Tabel 5, variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $1,594 < 1,9815$  sehingga  $t$  hitung berada pada bagian daerah tidak berpengaruh dengan tingkat signifikansi  $0,114 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Hal ini diduga ukuran perusahaan yang besar berkemungkinan enggan untuk melakukan pengungkapan *forward-looking information* karena memiliki tekanan risiko litigasi yang tinggi dan dapat memberikan strategi perusahaan kepada pesaing. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Al-Najjar & Abed (2014), Buertey & Pae (2020), dan Ajibola

(2017) yang menunjukkan pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *forward-looking information*.

*Leverage* (LEV) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan rasio perbandingan dari total utang perusahaan dengan total aset perusahaan. Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 5, variabel kontrol *leverage* memiliki nilai t hitung sebesar  $1,227 < 1,981$  sehingga t hitung berada pada bagian daerah tidak berpengaruh dengan tingkat signifikansi  $0,821 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Hal ini kemungkinan disebabkan pengungkapan *forward-looking information* tidak berpengaruh dalam keputusan kreditor dalam pertimbangan pemberian pinjaman. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Buertey & Pae (2020), Mujiono & Nany (2010), dan Ajibola (2017) yang menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Profitabilitas (PRFT) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan rasio *Return On Equity* (ROE). Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 5, variabel kontrol profitabilitas memiliki nilai t hitung sebesar  $0,726 < 1,9815$  sehingga t hitung berada pada bagian daerah tidak berpengaruh dengan tingkat signifikansi  $0,470 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya variasi pengungkapan *forward-looking information* tidak dipengaruhi oleh total laba bersih tahun berjalan yang dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Agyei-Mensah (2017) dan Uyar & Kilic (2012) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*; (2) Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*; (3) Kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*; (4) Proporsi komite audit independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*; (5) Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*; (6) Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

## KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian ini adalah Pertama, penelitian ini terbatas pada periode sebelum pandemi Covid-19. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengungkapan *forward-looking information* pada periode pandemi Covid-19. Hal ini dapat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman mengenai pola pengungkapan perusahaan pada periode yang khusus sebagaimana sejumlah penelitian dilakukan khusus pada periode krisis ekonomi dan membandingkan pola pengungkapan pada periode pandemic dengan pola pengungkapan pada kondisi normal.

Kedua, penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan *forward-looking information* berdasarkan indeks item pengungkapan berasal dari penelitian di luar negeri dan belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat merujuk pada indeks pengungkapan *forward-looking information* yang dirumuskan di Indonesia.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pengukuran pengungkapan *forward-looking information* berdasarkan indeks pengungkapan. Peneliti selanjutnya dapat

mengkaji penggunaan metode pengukuran selain indeks. Sebagai contoh pengukuran pengungkapan *forward-looking information* yang menggunakan sistem pengkodean untuk mencari kata kunci sebagaimana pada penelitian Abed & Robers (2011) yang dikembangkan oleh Abed, Al-Najjar & Roberts (2014).

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain dalam mewakili mekanisme *corporate governance* seperti dalam mewakili efektivitas kinerja dari dewan komisaris dapat mempertimbangkan variabel kompensasi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris yang mana frekuensi rapat dewan komisaris lebih memiliki keberagaman data dan juga menghitung berapa banyak dewan komisaris yang mempunyai latar belakang akuntansi. Untuk mewakili efektivitas kinerja komite audit dapat mempertimbangkan ukuran komite audit, karena lebih mempunyai data yang bervariasi. Untuk mewakili struktur kepemilikan, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan pengaruh kepemilikan keluarga, manajerial, dan institusional yang mana struktur kepemilikan ini lebih dominan daripada kepemilikan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abed, S., Al-Najjar, B., & Roberts, C. (2016). Measuring annual report narratives disclosure: Empirical evidence from forward-looking information in the UK prior the financial crisis. *Managerial Auditing Journal*, 31(4-5), 338-361. <https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2014-1101>
- Agustin, H.E., & Oktavianna, R. (2019). Pengaruh porsi kepemilikan publik, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran kap terhadap pengungkapan sukarela. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 093.
- Agyei-Mensah, B.K. (2017). The relationship between corporate governance, corruption and forward-looking information disclosure: a comparative study. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(2), 284-304.
- Ajibola, J. (2017). Corporate governance attributes as correlates of disclosure of forward-looking information on the Nigerian Stock Exchange. *World Journal of Finance and Investment Research*, 2(1), 1-15.
- Al-Najjar, B., & Abed, S. (2014). The association between disclosure of forward-looking information and corporate governance mechanisms: Evidence from the UK before the financial crisis period. *Managerial Auditing Journal*, 29(7), 578-595.
- Aljifri, K., & Hussainey, K. (2007). The determinants of forward-looking information in annual reports of UAE companies. *Managerial Auditing Journal*, 22(9), 881-894.
- Aljifri, K., Hussainey, K., & Oyelere, P. (2013). The determinants of forward-looking disclosure: A corporate governance perspective. *Corporate Ownership and Control*, 10(2 A), 8-19.
- Alkhatib, K. (2014). The determinants of forward-looking information disclosure. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 858-864.
- Botosan, C.A. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital: South African Evidence. *The Accounting Review*, 72(3), 323-349.
- Buertey, S., & Pae, H. (2020). Corporate Governance and Forward-Looking Information Disclosure: Evidence from a Developing Country. *Journal of African Business*, 22(3), 293-308.
- Choi, F.D., & Meek, G.K. (2008). *International accounting, 6th edition*. Pearson.
- Dzaraly, M., Lokman, N., & Othman, S. (2018). Corporate governance mechanisms and voluntary disclosure of strategic and forward looking information in annual reports. *International Journal of Accounting, Finance and Business*, 3(15), 86-104.
- Endres, D., & PricewaterhouseCoopers, L. L. P. (2007). The determination of corporate taxable income in the EU member states.
- Fatmawati, R., Astuti, D.W., & Suhardjanto, D. (2018). Peran corporate governance dalam meningkatkan voluntary disclosure. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 57-69.
- Hassanein, A., & Hussainey, K. (2015). Is forward-looking financial disclosure really informative? Evidence from UK narrative statements. *International Review of Financial Analysis*, 41, 52.
- Hutagalung, F.D., Tanjung, A.R., & Basri, Y.M. (2018). The influence of institutional ownership, public

- ownership, investment opportunity set (ios), and company size on quality of earnings: Voluntary disclosure as the intervening variable. *Bilancia*, 2 (1), 73-84.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kompas.com. (2018). Tumbuh 44 persen jumlah investor pasar modal di 2018 capai 16 juta. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/>
- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2018). Determinants of forward-looking disclosures in integrated reporting. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 115-144.
- Lukviarman, N. (2004). Etika bisnis tak berjalan di Indonesia: Ada apa dalam corporate governance? *Jurnal Siasat Bisnis*, 2(9), 139-156.
- Maghfira, A., & Tresnaningsih, E. (2018). An analysis of forward-looking disclosures, corporate governance and the ability to anticipate future earnings: Empirical evidence from Indonesia. 55(Iac 2017), 130-135.
- Mardani, A., & Kristanto, A.B. (2020). Karakteristik direksi dan pengungkapan informasi berwawasan masa depan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Menicucci, E. (2013). Firms' characteristics and forward-looking information in management commentaries of Italian listed companies. *African Journal of Business Management* 7(17), 1667-1674.
- Mujiono, M., & Nany, M. (2010). Pengaruh leverage, saham publik, size dan komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 129-134.
- Muliawati, A. C., & Rohman, A. (2019). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap ketepatan dan keakuratan pengungkapan forward-looking information. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1-15.
- Mutmainnah, N., & Wardhani, R. (2013). Analisis dampak kualitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 147-170.
- Nugraheni, B.D. (2018). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 16(3), 352-367.
- Oktriani, R., & Arza, F.I. (2018). Pengaruh listing age dan ownership dispersion terhadap luas pengungkapan sukareka dengan firm size sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016). *Wahana Riset Akuntansi*, 6(2), 1255.
- Pratiwi, M.W., & Palupi, A.F. (2017). Analisis pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, umur perusahaan, difusi kepemilikan, profitabilitas, leverage, dan tingkat pertumbuhan terhadap tingkat pengungkapan segmen operasi. *Media Riset Akuntansi*, 5(1), 1-11.
- Purbandani, E., & Restuti, M.D. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela melalui internet pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012.
- Qu, W., Ee, M. S., Liu, L., Wise, V., & Carey, P. (2015). Corporate governance and quality of forward-looking information: Evidence from the Chinese stock market. *Asian Review of Accounting*, 23(1), 39-67.
- Rafifah, U.R., & Ratmono, D. (2015). Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4 (3), 475-487.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19 (2), 85-98.
- Sari, R.N., Anugerah, R., & Dwiningsih, R. (2010). Pengaruh struktur kepemilikan, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap transparansi informasi. *Pekbis Jurnal*, 2(3), 326-335.
- Scott, W.R., & O'Brien, P.C. (2019). *Financial accounting theory* (8th ed.). Prentice Hall.
- Setiawan, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sukarela pada bank umum di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 1(1), 90.
- Siagian, G.E., & Ghozhali, I. (2012). Pengaruh struktur dan aktivitas good

- corporate governance terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada website perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 189-199.
- Sunyoto, & Hidayanti, E. (2009). Pentingnya pengungkapan laporan keuangan dalam meminimalisasi asimetri informasi. *Jurnal WIG*, 4(2), 19-28.
- Suyono, & Eko. (2018). Peran Komite audit dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan: Bukti empiris di bursa efek negara-negara teluk. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7(1), 7-16.
- Utami, W., & Wahyuni, P.D. (2018). Forward-looking information based on integrated reporting perspective: Value relevance study in Indonesia Stock Exchanges. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 8(4), 1-12.
- Utami, W., Wahyuni, P.D., & Nugroho, L. (2020). Determinants of stock liquidity: Forward-looking information, corporate governance, and asymmetric information. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 795-807.
- Uyar, A., & Kilic, M. (2012). Influence of corporate attributes on forward-looking information disclosure in publicly traded Turkish Corporations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62, 244-252.
- Zulfikar, R., Nofianti, N., & Faozy, A.N. (2019). Pengaruh komisaris independen dan karakteristik komite audit terhadap internet financial reporting disclosure. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 9-17.